



# MIMIKA MEMBANGUN



*Eme Neme Yauware*



## Salam Redaksi

Pembaca yang terhormat, Media Bappeda ini kami hadirkan sebagai implementasi dari tanggungjawab kami untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang lengkap dan benar atas berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Mimika.

Percepatan pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah, baik infrastruktur maupun pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia, serta mental spiritual, secara bersamaan dan sinergis, dengan melibatkan semua unsur dalam pemerintahan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Mimika.

Media ini adalah dokumentasi atas sebagian dari perjalanan pembangunan di Kabupaten Mimika. Kami persembahkan untuk seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu sumber informasi atas kiprah pemerintah yang benar, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk peningkatan kualitas Media ini dan bagi kemajuan pembangunan di Mimika.

Tim Redaksi

### Pengarah

Bupati Mimika

### Penanggungjawab

Kepala Bappeda

### Tim Redaksi Koordinator

Sekretaris Bappeda Mimika

### Anggota :

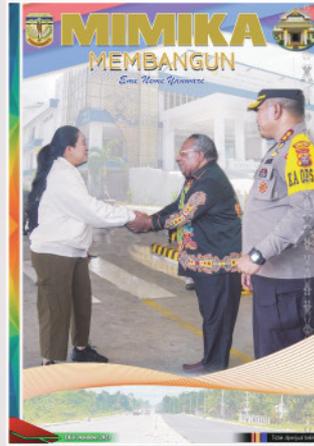
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan Ekonomi

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kepala Bidang Pengendalian

Kantor Bappeda Kabupaten Mimika  
Jl. Cendrawasih SP.II, Utikini Baru,  
Kec. Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua. 99963



# Mimika Membangun Edisi Desember

## Daftar Isi

- Laporan Utama Hal. 3-5
- Laporan Khusus Hal. 6-19
- Bidang Infrastruktur Hal. 20-36
- Bidang Sosial Budaya Hal. 37-44
- Bidang Ekonomi Hal. 45-47



# Bupati Sambut Kunjungan Kerja Ketua DPR RI

**K**ETUA DPR RI, Puan Maharani berkunjung ke Kabupaten Mimika. Kedatangan Puan bersama rombongan disambut Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mewakili Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk di terminal AVCO Bandara Mozes Kilangin Timika pada Sabtu (9/12/2023).

Turut hadir Presiden Direktur PT

Freeport Indonesia, Tony Wenas serta jajaran manajemen PT Freeport Indonesia dan Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng merasa bangga karena Ketua DPR RI menyempatkan waktu bertemu pemerintah daerah. Tidak seperti petinggi negara lainnya seperti menteri yang



Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menyambut kedatangan Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Foto: Bappeda



Foto: Bappeda

terkadang langsung ke area Freeport tanpa bertemu Pemda.

“Tapi kali ini, Ketua DPR RI sempat waktu bertemu dengan pemerintah daerah, sehingga saya sangat bangga sebagai Bupati karena pimpinan lembaga negara bisa berdiskusi dengan pemerintah daerah,” ucapnya.

Saat menyambut Ketua DPR RI, Bupati Omaleng menyampaikan perkembangan Kabupaten Mimika. Seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai Rp 7,5 triliun karena adanya tambang PT Freeport Indonesia sebagai penyumbang terbesar. Apalagi sejak diberlakukannya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dimana Kabupaten Mimika mendapat dividen 2,5 persen dari keuntungan bersih.

Bahkan Bupati menyatakan, apabila dividen dari hasil divestasi saham

sebesar 7 persen sudah bisa dicairkan maka APBD Mimika bisa mencapai Rp 16 triliun. “APBD Rp 7,5 triliun, bukan karena lain-lain tapi dengan adanya Freeport sehingga APBD Mimika bisa meningkat sebesar ini untuk digunakan membangun Mimika,” kata Bupati Omaleng.

APBD sebesar ini diungkapkan Bupati Omaleng digunakan untuk membiayai program pembangunan di segala bidang. Mulai dari pendidikan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu hasil pembangunan yang ditunjukkan Bupati Mimika adalah fasilitas Bandara Mozes Kilangin yang sudah beroperasi untuk melayani penerbangan komersil. Sementara terminal lama digunakan untuk kepentingan PT Freeport Indonesia.

Untuk itu Bupati Omaleng sendiri





terus mendukung keberlangsungan PT Freeport Indonesia karena bisa menghidupkan dan turut serta membangun Kabupaten Mimika bahkan Papua.

“Saya pribadi juga tidak pernah mengeluh kepada Freeport, tidak pernah menuntut segala macam karena APBD besar itu karena adanya Freeport. Justru kalau orang lain mau ganggu Freeport saya bantu untuk menga-

mankan, bantu keamanan TNI dan Polri menjaga Freeport,” tandasnya.

Ketua DPR RI berkunjung ke Mimika lebih khusus berkunjung ke area tambang PT Freeport Indonesia di Tembagapura. Sehingga begitu tiba, Puan Maharani langsung bertolak ke Tembagapura menggunakan bus khusus anti peluru milik PT Freeport Indonesia. (BAPPE-DA)



**Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menyambut kedatangan Ketua DPR RI, Puan Maharani.**



# Pemkab Mimika Usulkan APBD Tahun 2024 Rp 7,5 Triliun

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024 sebesar Rp 7,5 triliun. Usulan itu diserahkan secara resmi oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dalam Pembukaan Rapat Paripurna I Masa Sidang DPRD Kabupaten Mimika tentang



Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024, Senin (11/12/2023) di Ruang Rapat Paripurna DPRD.

Bupati Eltinus Omaleng mengatakan Penyusunan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ini, telah diawali dengan penandatanganan berita acara kesepakatan KUA dan PPAS antara pemerintah daerah dan DPRD

pada 7 Desember 2023 lalu.

RAPBD ini dikatakan Bupati, telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, termasuk rencana penerimaan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat yang mendasarkan informasi resmi pada website kementerian keuangan republik indonesia, perihal penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2024. Juga sesuai

amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Disamping itu, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 tetap memperhatikan prioritas program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah yang telah disesuaikan dalam kodifikasi, klasifikasi dan

TANG

## AN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KA. 11 DESEMBER 2023





**Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE MH menyerahkan KUA PPAS kepada Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng.**

nomenklatur baru yang telah dimutakhirkan, mempedomani Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang kodifikasi, klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Rancangan APBD 2024 ini juga disusun secara elektronik, dan terintegrasi dengan tahapan perencanaan, dengan menggunakan sistem aplikasi perencanaan dan keuangan nasional terbaru, yaitu, Sistem Informasi Pemerinta-

han Daerah ( SIPD ) sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Bupati Omaleng mengungkapkan, Pendapatan daerah ditargetkan sebesar



**Bupati Omaleng mengungkapkan, Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 7,5 triliun. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 4.295.117.126.194. Pendapatan transfer sebesar Rp3.201.882.873.806. Sedangkan belanja dianggarkan sebesar Rp 7,5 triliun.**

Rp 7,5 triliun. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4.295.117.126.194. Pendapatan transfer sebesar Rp3.201.882.873.806. Sedangkan belanja dianggarkan sebesar Rp 7,5 triliun.

Penyusunan rencana pendapatan ini didasarkan pada rata-rata realisasi pendapatan asli daerah dengan melihat kondisi perkembangan daerah. Pendapatan transfer berdasarkan UU APBN Tahun 2024. Sisa kurang bayar Dana Bagi Hasil yang akan dibayar Tahun

2024, pendapatan transfer dari provinsi sesuai SK Gubernur Provinsi Papua dan RD Otonomi Khusus serta pendapatan lainnya.

Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Anton Bukaleng mengatakan KUA PPAS mempunyai peranan yang penting dalam penyusunan APBD yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan adanya panduan KUA, Pemda dapat fokus kepada program yang memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejah-

teraan dan pertumbuhan ekonomi. PPAS membantu mengarahkan lokasi dan untuk melaksanakan program yang telah direncanakan.

Ia juga menyatakan seharusnya KUA PPAS disampaikan pada bulan Februari tahun berjalan. Sementara bulan November baru dilakukan pembahasan KUA PPAS. "Diharapkan Banggar dan TAPD dapat melaksanakan tahapan selanjutnya agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan APBD di Tahun 2024," jelas Anton. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda



# Dibangun Megah

# Bupati Omaleng Resmikan Kantor Dinas Pendidikan

**S**ETELAH dibangun dalam beberapa tahap, kantor baru Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika akhirnya rampung dan siap digunakan. Gedung kantor yang berdiri di Jalan Poros SP 2 – SP 5 itu diresmikan Selasa (5/12/2023) oleh Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH didampingi Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Jeni Usmany.





Foto: Bappeda

Peresmian dirangkaikan dengan puncak peringatan Hari Guru sehingga, peresmian kantor ini juga disaksikan oleh ribuan guru yang ada di Kabupaten Mimika. Turut hadir Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan OPD lingkup





Pemkab Mimika dan tamu undangan.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dalam sambutannya mengatakan pembangunan gedung kantor baru ini merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan di Kabupaten Mimika. Oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, selama memimpin Kabupaten Mimika, Bupati Omaleng sudah berusaha meningkatkan mutu pendidikan dengan menyiapkan sarana prasa-

rana baik itu pembangunan gedung sekolah atau ruang kelas, rumah guru baik yang ada di pedalaman maupun pinggiran dan kota.

Tidak hanya itu, untuk menopang operasional sekolah sehingga tidak hanya mengandalkan dana BOS yang bersumber dari pusat, Pemkab Mimika juga mengambil kebijakan mengalokasikan dana Bantuan Operasional Pendidikan (Bopda) bagi sekolah yang bersumber dari APBD. Pemberian makanan tambahan bagi





Foto: Bappeda

pelajar di wilayah pedalaman selama kepemimpinan Bupati Omaleng juga dijalankan. Tujuannya untuk membantu murid dalam hal pemenuhan gizi.

Selain itu untuk memastikan layanan pendidikan lewat proses belajar mengajar di wilayah pedalaman, melalui Dinas Pendidikan telah direkrut ratusan guru honorer yang ditempatkan di pedalaman dengan pengawasan dari dinas agar selalu berada di tempat tugas.

Salah satu gambaran adanya peningkatan kualitas pendidikan di Mimika adalah dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan

Manusia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM di Mimika Pada Tahun 2017 sebesar 72,42, Tahun 2018 sebesar 73,15 dan Tahun 2019 sebesar 74,13. Capaian ini menempatkan Mimika berada di urutan kedua setelah Kota Jayapura dengan IPM tertinggi di Tanah Papua.

Bertepatan dengan momen peringatan Hari Guru, Bupati kembali mempersembahkan kado berupa kenaikan tunjangan tambahan penghasilan bagi pegawai termasuk guru. “Sebagai bentuk kepedulian saya untuk kesejahteraan pegawai di Kabupaten Mimika, pada Tahun 2018

saya menaikkan tunjangan tambahan penghasilan sebesar 100 persen dan sebelum mengakhiri masa jabatan saya menaikkan tunjangan tambahan penghasilan sebesar 50 persen termasuk bagi para guru dan khusus untuk kepala sekolah saya menaikkan tunjangan tambahan penghasilan setara pejabat eselon 4,” terang Bupati disambut tepuk tangan ribuan guru.

Dengan kebijakan ini, Bupati berharap para guru dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan guna mewujudkan generasi emas 4.0. (BAPPEDA)

# Bupati Mimika Serahkan Hibah Senilai Rp 55 Miliar Bagi 67 Tempat Ibadah

**B**UPATI Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH menyerahkan hibah kepada 67 tempat ibadah dengan total senilai Rp 55,8 miliar. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati kepada 11 perwakilan penerima di Gereja KINGMI Mile 32 usai ibadah Minggu (3/12/2023).

Hibah ini diberikan kepada sejumlah gereja Protestan, Katolik dan denominasi gereja lainnya, Islam, Hindu dan Budha.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mengatakan ini bukan pertamanya

Pemkab Mimika alokasikan hibah kepada tempat ibadah. Tapi pada tahun-tahun sebelumnya juga terus dilakukan. Baik dalam bentuk hibah dana, pembangunan, maupun peralatan peribadatan. Tapi khusus tahun ini ada 67 tempat ibadah yang menerima hibah senilai Rp 55,8 miliar.

Penyerahan sengaja dipilih Bupati, dilaksanakan di Gereja Mile 32 sebagai pertanda bahwa gereja yang dibangun dengan anggaran pemerintah itu merupakan milik semua agama yang ada di Mimika atau menjadi sim-

bol persatuan umat beragama yang ada di Mimika. "Gereja ini untuk mempersatukan semua umat beragama bukan untuk membedakan. KINGMI di Tanah Papua bukan musuh negara atau musuh agama, sehingga kita undang hadir di gereja ini untuk penyerahan dana hibah," jelas Bupati Omaleng.

Bupati menjelaskan, hibah ini berdasarkan pengajuan dari setiap tempat ibadah melalui proposal kemudian diakomodir dalam APBD Kabupaten Mimika. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

Bantuan dana hibah diserahkan secara simbolis oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng untuk Gereja Kingmi Martin Luther Amungsa Mile 32



**Bantuan dana hibah diserahkan secara simbolis oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng untuk pembangunan Vihara**



**Bantuan dana hibah diserahkan secara simbolis oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng untuk pembangunan Pura**



Foto: Bappeda

Bantuan dana hibah diserahkan secara simbolis oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng untuk Gereja GPDI Bethesda Mile 32





Foto: Bappeda

Bantuan dana hibah diserahkan secara simbolis oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng untuk Gereja Masehi Advent hari Ketujuh Jemaat Pioner



# Masa Jabatan Bupati Mimika Diperpanjang Hingga September 2024



**M**ASA jabatan Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH dan Wakil Bupati, Johannes Rettob, SSos MM diperpanjang hingga 6 September 2024. Hal itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, dimana kepala daerah hasil Pilkada 2018 dan baru dilantik pada 2019 berhenti dari jabatannya di akhir tahun 2024.

Mengacu pada putusan tersebut, maka kepala daerah yang dilantik Tahun 2019 salah satunya Bupati dan Wakil Bupati Mimika bisa menjabat hingga akhir masa jabatan dengan ketentuan maksimal sampai satu bulan menjelang pemungutan suara pemilihan kepala

daerah.

Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan aturan pemotongan masa jabatan. "Seperti kami di Mimika dilantik Tahun 2019, awalnya disebut berakhir 31 Desember 2023 tapi setelah keputusan MK dan sekarang sudah ditindaklanjuti Mendagri, jadi masa jabatan dihitung sejak tanggal pelantikan bukan Pilkada," jelas Bupati.

Dengan keputusan ini maka masa jabatan Bupati Omaleng tetap berakhir pada 6 September 2024 atau tepat dua bulan sebelum pelaksanaan Pilkada serentak pada November 2024.

Perpanjangan masa jabatan ini men-

jadi kesempatan bagi Bupati Omaleng untuk menuntaskan program pembangunan yang sedang dijalankan baik itu infrastruktur jalan, bangunan perkantoran dan program lainnya.

## Keputusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (5) [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota \(UU Pilkada\)](#) inkonstitusional secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai "Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan Tahun 2018 menjabat sampai dengan Tahun 2023 dan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan Tahun 2019 memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024."

Demikian pertimbangan hukum Mahkamah yang dibacakan Wakil Ketua MK Saldi Isra terhadap uji [UU Pilkada](#). Sidang Pengucapan Putusan terhadap Perkara Nomor [143/PUU-XXI/2023](#) yang diajukan oleh tujuh kepala daerah yang mendaftarkan Pasal 201 ayat (5) [UU Pilkada](#) ini digelar pada Kamis (21/12/2023). Adapun ketujuh kepala daerah dimaksud yakni Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E. Dardak,



Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wakil Wali Kota Bogor Didie A. Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten A. Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, dan Wali Kota Tarakan Khairul.

Lebih jelas Saldi menguraikan bahwa ketentuan Pasal 201 ayat (5) [UU Pilkada](#) secara khusus dan norma transisi dalam ketentuan Pasal 201 UU Pilkada secara keseluruhan masih menyisakan persoalan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan 2018, namun baru dilantik pada 2019 karena masa jabatan kepala daerah sebelumnya baru berakhir pada tahun tersebut.

Padahal, sambung Saldi, Pasal 201 ayat (4) UU Pilkada secara eksplisit menyatakan adanya kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2019 tidak diatur secara tersendiri dalam kaitannya dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada. Akibatnya, kepala daerah/wakil kepala daerah yang baru diantik pada 2019 seperti dipaksa mengikuti masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilantik pada 2018.

Padahal kepala daerah yang dilantik pada 2019 dilantik karena masa jabatan kepala daerah sebelumnya baru berakhir pada 2019. Sehingga Mahkamah melihat ada kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon berupa pemotongan masa jabatannya yang bukan disebabkan oleh implementasi norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada, melainkan akibat kekosongan norma yang mengatur Pasal 201 ayat (5) dengan

Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang dipilih pada 2018 dan baru dilantik pada 2019 karena menunggu berakhirnya masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya.

Menurut Mahkamah, sambung Saldi, dalil para Pemohon terkait dengan ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dapat dibenarkan. Namun sepanjang berkenaan dengan perhitungan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati hari pemungutan suara serentak nasional 2024 sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya, tidak dapat dipenuhi Mahkamah.

“Sebab, dibutuhkan waktu yang cukup untuk menunjuk pejabat kepala daerah agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang berdasarkan penalaran yang wajar dan dipandang cukup yakni satu bulan sebelum hari H pemungutan suara serentak secara nasional yang diberlakukan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir 5 tahun sejak pelantikan,” jelas Saldi.

Untuk itu, dalam Amar Putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo tersebut, Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Mahkamah juga menyatakan Pasal 201 ayat (5) Pilkada yang semula menyatakan, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024”.

“Sehingga, norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada selengkapnya menjadi menyatakan, ‘Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024’,” tandas Suhartoyo. **(BAPPEDA)**



# Pemkab Susun RPJPD 2025-2045, Bupati Omaleng Ungkap Capaian 10 Tahun

**P**emerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dimulai dengan menyusun rancangan awal.

Penyusunan RPJPD 2025-2045 dilakukan karena RPJPD periode sebelumnya berakhir di Tahun 2024 mendatang. Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH saat membuka kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Ranwal RPJPD





Mimika di Hotel Swissbell, Selasa (5/12/2023) mengungkap beberapa capaian pemerintahan dalam 10 tahun terakhir.

Dalam 10 tahun terakhir Kabupaten Mimika kata Bupati Omaleng secara nyata menunjukkan capaian kinerja pembangunan yang semakin meningkat, dapat dibuktikan dengan beberapa data. Diantaranya, kualitas pembangunan manusia terus meningkat, melalui program pendidikan dan kesehatan, infrastruktur yang memadai, dimana IPM naik pesat dari 67,96 poin di tahun 2010 menjadi 75,08 poin di Tahun 2022.

Kemiskinan dan ketimpangan semakin menurun, melalui program kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tahun 2013, angka kemiskinan masih 20,37 persen pada Tahun 2018 turun ke angka 14,89 persen.

Perekonomian wilayah tumbuh pesat, melalui program unggulan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan sehingga

mampu meningkatkan pendapatan regional ( PDRB harga berlaku ) dari Rp 62,65 triliun di Tahun 2010, meningkat menjadi Rp 95,23 triliun di Tahun 2021.

Penduduk terkendali dan orang yang bekerja semakin meningkat, melalui program kependudukan dan ketenagakerjaan yang inovatif. Kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah semakin baik, melalui penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik semakin transparan, akuntabel dan partisipatif, dimana kabupaten mimika, mampu mempertahankan opini WTP berturut turut dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Kemandirian fiskal naik sangat signifikan dari 9,66% di tahun 2010, menjadi 25,36% di tahun 2021.

Reputasi Kabupaten Mimika secara nasional maupun tingkat provinsi semakin membanggakan, dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang telah diraih pemerintah selama ini.

Untuk itu dalam penyusunan Ranwal RPJPD 2025-2045, Bupati Omaleng menekankan agar program yang telah dilaksanakan bisa dilanjutkan. "Kita memiliki harapan yang sama untuk melihat Kabupaten Mimika yang lebih maju, lebih sejahtera dan berkelanjutan di Tahun 2045," tandasnya.

Kabupaten Mimika kata Bupati Omaleng, adalah tanah terberkati dengan potensi sumber daya alam melimpah mulai dari gunung sampai pesisir. Keberagaman suku dan budaya, dan secara geografis berada di posisi yang sangat strategis.

"Harapan kita semoga impian seluruh masyarakat Mimika, dapat menikmati kekayaan alamnya lebih baik lagi, melalui pembangunan secara bertahap selama 20 tahun ke depan, mari kita bersama bergandengan tangan, bahu membahu, memberikan yang terbaik menuju Mimika Unggul 2045," harap Bupati Omaleng. **(BAPPEDA)**



# Realisasi Program Pembangunan Pemkab Mimika Sudah 83 Persen

**H**INGGA minggu ketiga Desember Tahun 2023, realisasi program Pemerintah Kabupaten Mimika sudah mencapai 83 persen. Hal itu diungkapkan Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi yang ditemui Selasa (19/12/2023) di kantornya.

Yohana mengungkapkan, pekan lalu sudah dilakukan monitoring dan juga secara berkala dipantau melalui aplikasi Simonev. Dari data yang di-update melalui Simonev, secara global realisasi fisik pembangunan sudah mencapai 83 persen. Ini belum termasuk program dalam APBD Perubahan yang masih sementara berjalan dan kontraknya sampai pekan keempat Desember.

Ia menyatakan, salah satu hal yang dikhawatirkan adalah kegiatan yang menggunakan dana Otsus tidak bisa tuntas. Ini disebabkan lambatnya proses pengadaan barang dan jasa serta kendala di lapangan. "Ya kita berharap pimpinan OPD terkait bisa membereskan halangan ini, jangan sampai SILPA dana Otsus," tandasnya.

Langkah-langkah menghadapi akhir tahun lanjut Yohana, sudah disampaikan ke semua pimpinan OPD sehingga setiap OPD harus mengikuti hal tersebut.

Bappeda akan kembali mengekspose Simonev pada 27 Desember mendatang. Untuk itu ia terus mengimbuai seluruh pimpinan OPD untuk mengarahkan operator untuk meng-update data setiap hari. "Jadi progres sudah bisa lebih dari 83 persen. Karena ada juga distrik yang belum isi. Karena kita lihat realisasi anggaran ada berarti ada tapi tidak isi datanya di Simonev," terang Yohana. **(BAPPEDA)**





**Jalan Lingkar Luar Mile  
32 - Gorong Gorong**



Foto: Bappeda



Jalan Mayon





Jalan Mayon





**Jalan Poros SP 2 - SP 5 yang**





**dikerjakan dengan kontrak multiyear**





**Peningkatan Jalan Busiri yang dilengkapi fasilitas trotoar dan saluran air menggunakan box culver**





## ● Gedung kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Foto: Bappeda

## ● Gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung





**● Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**





## ● Pembangunan gedung Sentra UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM



Foto: Bappeda

## ● Pembangunan gedung kantor Dinas Perhubungan Mimika





● **Pembangunan Kantor Polsek Pelabuhan Udara oleh Pemkab Mimika melalui Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Mimika.**



● **Pembangunan ruang kelas baru SD Negeri 5 Timika Jaya**





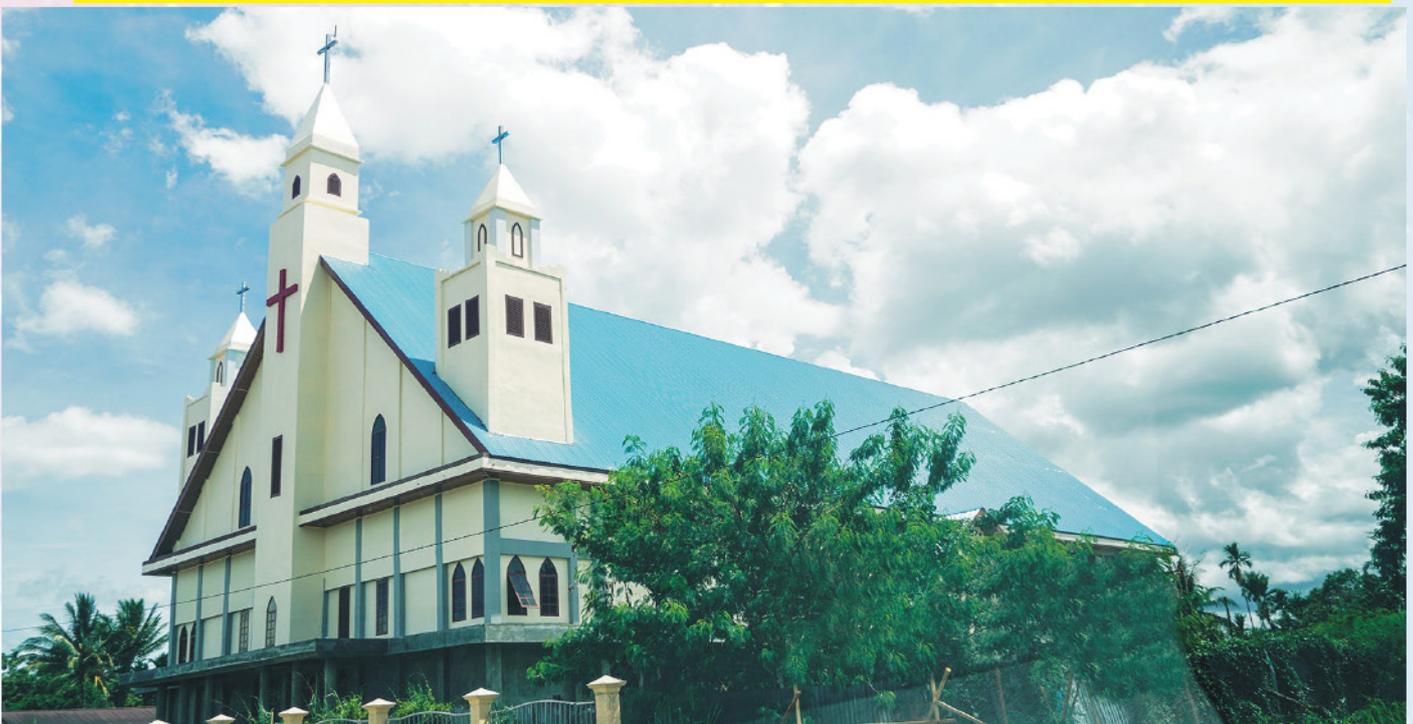
## ● Pembangunan ruang kelas SD Inpres Timika II



## ● Pembangunan ruang kelas SD Negeri Inauga



## ● Gedung Gereja KINGMI Jemaat Rehobot di Jalan C Heatubun yang dibangun dengan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Mimika





**Pembangunan rumah sehat layak huni bagi masyarakat asli Papua di Distrik Mimika Timur**



Foto: Bappeda

# 23 Jembatan Dibangun Dinas PUPR Sepanjang 2023

**D**INAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, membangun 23 jembatan di tahun 2023.

Jembatan yang dibangun tersebar di beberapa wilayah baik di Kota Timika, pesisir sampai pegunungan. Konstruksinya berbeda. Untuk jembatan di kota berupa beton rangka baja sementara di pegunungan konstruksinya jembatan gantung.

Pembangunan jembatan baik di pegunungan maupun pesisir dilakukan untuk menghubungkan antar kampung terutama ke fasilitas pemerintahan yang berada di ibu kota distrik. Seperti pembangunan jembatan Banti-Kimbeli sebagai akses menuju Kota Tembagapura. Panjang jembatan ini terbentang 100 meter.

Begitu juga di Jila dimana dua jembatan gantung dibangun masing-masing dengan bentangan 100 meter dan 30 meter.

Beberapa diantaranya ada jembatan gantung di Banti - Kimbeli dengan bentangan sepanjang 100 meter. Di Agimuga ada dua jembatan sepanjang 8 dan 6 meter. Di Kokonao dan Atuka dibangun hingga terhubung ke dermaga atau tambatan perahu.

Di Jita, jembatan juga dibangun sepanjang 100 meter sebagai akses masyarakat antar kampung dan juga anak-anak sekolah. Selama ini, akses ke kampung lewat sungai sehingga masyarakat harus menggunakan perahu. Sebelumnya sudah ada jembatan kayu namun rusak sehingga dibangun kembali.

Ada juga jembatan sepanjang 90 meter di Kapiroaya dan dua jembatan lain di Kokonao dan Amar. Untuk di wilayah kota, jembatan-jembatan dibangun di area SP 3 jalan menuju Kwamki Nara-



Foto: Bappeda

## Tim Dinas PUPR Mimika memantau pembangunan jembatan di Jila

ma. Jalan Hasanudin (Irigasi) RT 19 jembatan sepanjang 10 meter. Di Kilometer 10, jembatan sepanjang 7 meter. Jembatan di Jalan Hasanudin (pohon jomblo) menuju Brigif sepanjang 15 meter.

Ada juga jembatan yang dibuat dari Pokir DPRD, diantaranya jembatan di Jalan Kelimutu, Jalan WR Supratman dalam, sepanjang 7 meter, dan di Jalan Rajawali 2 jalur 2, SP 4 sepanjang 6 meter. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

## Pembangunan jembatan di Jila

# Jalan Petrosea-Bandara Mozes Kilangin Mulai Dibangun

**P**EMBANGUNAN jalan akses bandara dari Bundaran Petrosea menuju Bandar Udara Mozes Kilangin Timika mulai dikerjakan. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10.055.800.000.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Aldi Padua mengungkapkan pembangunan jalan dimulai dengan land clearing atau pembersihan lahan sepanjang sekitar 800 meter dan lebar 40 meter. Sebelum dikerjakan, telah dilakukan

pembayaran ganti rugi kepada para pemilik tanah. Di lokasi itu ada 5 pemilik tanah.

Pembangunan dilakukan oleh kontraktor pelaksana CV Maina Jaya. Pekerjaan tidak hanya land clearing tapi langsung ditimbun bahkan langsung diaspal disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. **(BAPPEDA)**



# Bupati Mimika Kembali Rotasi Pejabat

**B**UPATI Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SEMH kembali melakukan bongkar pasang jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika. Rolling pejabat digelar Selasa (5/12/2023) di Pendopo Rumah Negara yang juga dihadiri Pj Sekda Mimika, Robert Henry Mayaut, Forkopimda dan tokoh agama.

Pada momen tersebut, Bupati mengganti beberapa pejabat eselon II diantaranya Hendritte Tandiyono dari jabatan Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Mimika karena memasuki masa persiapan pensiun. Juga Maria Rettob dari jabatan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemkab Mimika. Serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM), Ananias Faot.

Bupati kemudian menunjuk Anace Hombore sebagai Plt Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Mimika. Kemudian Ananias Faot digeser menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan. Yakobus Karet ditunjuk menjadi Plt Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik menggantikan Septinus Timang.

Mengisi kekosongan Kepala BKPSDM, Bupati Omaleng menunjuk Evert Lukas Hindom, SSTP MH menjadi Pelaksana Tugas.



Selebihnya jabatan yang banyak dibongkar pasang adalah jabatan administrator atau sebelumnya disebut eselon III seperti sekretaris dinas atau badan, kepala bagian, kepala distrik. Serta pejabat pengawas atau eselon IV untuk jabatan kepala seksi dan kepala sub bagian. Tidak hanya itu, meski tidak seluruhnya Bupati juga mengganti beberapa lurah, kepala puskesmas dan kepala sekolah.

Bupati Mimika dalam sambutannya mengatakan rotasi ini sebagai upaya penyegaran struktur organisasi perangkat daerah. Menurutnya, kematangan kepemimpinan di dunia birokrasi akan terbentuk jika seorang pejabat mengemban tugas dalam perjalanan karir yang dinamis.

Dalam menjalankan tugas ASN dituntut harus menguasai teknologi informasi sejalan dengan era globalisasi 4.0. Juga demi tercapainya esensi pekerjaan maka ASN harus memahami tugas dan fungsi tempat yang baru.

Terlebih kata Bupati, tantangan ekonomi terus bermunculan sehingga apabila tidak segera ditangani maka akan menjadi ancaman. Untuk itu koordinasi dan sinergi yang solid oleh jajaran pejabat dan pegawai harus tetap dijaga bahkan terus ditingkatkan.

"Saya selalu meyakini bahwa siapapun yang menjadi pemimpin, pegawai akan tetap menunjukkan kinerja luar biasa karena sudah memiliki komitmen kuat dan nilai moral yang dipegang teguh," terang Bupati. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda



# Bupati Mimika Berangkatkan 90 Warga Umrah ke Tanah Suci

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika memberangkatkan 90 warga untuk menjalankan ibadah umrah ke Tanah Suci, Mekah. Keberangkatan 90 warga dilepas langsung oleh Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH di Bandara Mozes Kilangin Timika pada Minggu (3/12/2023).

Bupati Omaleng menyatakan ini merupakan wujud perhatian dari Pemerintah Daerah kepada umat Muslim di Kabupaten Mimika. "Kami berharap ini jadi momentum bagi jamaah umrah untuk dapat manfaat spiritual yang mendalam dari perjalanan suci ini, semoga pengalaman di Tanah Suci jadi teladan bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat," katanya.

Semoga kata Bupati, jamaah umrah yang diberangkatkan kali ini bisa menjadi berkah dengan membawa pulang kebaikan, kedamaian dan keselamatan bagi keluarga dan masyarakat.

Bupati Omaleng juga menitipkan



Foto: Bappeda

doa kepada para jamaah agar perjalanan ini jadi jalan bagi kesuksesan dan kemajuan bagi Kabupaten Mimika.

"Doakan Kabupaten Mimika jadi

kabupaten yang agamis dan berikan terbaik kepada masyarakat serta dapat kembali dengan keimanan dan keikhlasan dengan baik," ujar Bupati Omaleng. (BAPPEDA)



# Bupati Mimika Lepas 165 Peserta Wisata Rohani ke Yerusalem

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika kembali membe-  
rangkatkan warga ke Yerusalem untuk  
menjalani wisata rohani.

Keberangkatan 165 peserta yang  
terdiri dari anggota DPRD Mimika, tokoh  
agama, tokoh perempuan dan masya-  
rakat ini dilepas secara langsung oleh  
Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE  
MH di Jakarta pada Jumat (29/12/2023).

Bupati Eltinus Omaleng mengatakan  
program ini merupakan wuju perhatian  
Pemerintah Daerah kepada umat nas-  
rani di Mimika, dengan harapan peser-  
ta yang terpilih bisa mendapat manfaat  
spiritual dari perjalanan suci.

“Semoga perjalanan di Yerusalem jadi  
ladang kebaikan bagi diri sendiri, kelu-  
arga dan masyarakat Mimika. Kiranya  
bawa berkat melimpah dan damai se-  
jahtera bagi kita dan Mimika, kembali  
membawa pulang sinar kebaikan, ke-



Foto: Bappeda

damaian dan keselamatan bagi kelu-  
arga dan masyarakat,” tegasnya.

Lewat perjalanan ini kata Bupati Om-  
aleng merupakan kesempatan yang

sangat berharga bagi peserta untuk  
mengunjungi tempat bersejarah di Yeru-  
salem yang selama ini hanya dibaca  
dalam Alkitab.



Foto: Bappeda



Sehingga perjalanan ini akan menjadi pengalaman rohani bagi peserta dengan harapan bisa menambah spiritual dan membawa berkat bagi orang lain baik itu keluarga dan masyarakat.

Perjalanan wisata rohani akan dilaksanakan terhitung mulai 29 Desember 2023 hingga 10 Januari 2024. Adapun beberapa tempat yang akan dikunjungi





mulai dari Kairo Mesir, Yerusalem di Israel dan Yordania.

Selama perjalanan, wisata rohani yang dipandu oleh Sharon Tour ini mengunjungi beberapa tempat bersejarah yang menjadi saksi kekristenan. Dimulai dari Kairo, dimana terdapat Gereja Koptik pertama. Kemudian mendaki Gunung

Sinai tempat Musa menerima dua loh batu.

Peserta berada di Mesir selama tiga hari. Kemudian melanjutkan perjalanan melalui darat ke Israel. Meski dengan pemeriksaan ketat di perbatasan, namun seluruh peserta akhirnya bisa menginjakkan kaki di Tanah Perjanjian.

Meski Israel sedang dilanda konflik yang akhir-akhir ini memanas, namun para peserta tetap bisa menjalani ibadah wisata rohani dengan aman dan nyaman. Selama di Yerusalem hingga ke Nazareth, Galilea dan sejumlah tempat lainnya, tidak ada gangguan yang dialami. (BAPPEDA)



**ALAN KE KANAAN**  
**APUA KE YERUSALEM**

ZIARAH ROHANI KABUPATEN MIMIKA  
- 09 JAN 2024 [sharontour.id](http://sharontour.id)

# Satpol PP Gelar Kerjasama antar Lembaga

**P**EMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam membangun dan memperkuat sinergitas antar lembaga Tahun 2023 di Hotel Swiss Bellin pada Rabu (6/12/2023).

Kegiatan ini dibuka Pj Sekda Mimika, Robert Mayaut dan dihadiri Roney Maryen, Kepala Satpol PP serta para peserta berasal dari Koramil, Distrik dan Babinkamtibmas dan Satpol PP.

Roney Maryen, Kepala Satpol PP dalam arahannya mengatakan, tujuan diselenggarakan kegiatan ini yakni, meningkatkan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, dalam membangun dan memperkuat sinergitas dalam upaya mewujudkan masyarakat yang tertib melalui pola kemitraan antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua Ten-



gah terlebih di Kabupaten Mimika.

“Pola kemitraan ini wajib di terapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan seluruh aparat keamanan, karena merupakan amanat dari Perda No 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, “ ungkapnya.

Menurutnya, agenda nasional tahun 2024 nanti membutuhkan koordinasi diberbagai tindakan untuk menyukseskan proses tahapan pemilihan umum.

Sementara itu, Robert Mayaut, Sekda

Mimika dalam sambutan pembukaan mengatakan, TNI Polri dan pemerintah daerah dalam agenda pemilu 2024 harus membangun kerjasama yang baik, sehingga pada pelaksanaan nanti aman dan sukses.

“Bentuk kepedulian pemerintah yakni kita telah memberikan dana hibah kepada KPU, Bawaslu, TNI dan Polri untuk menyukseskan kontestasi pemilu mulai dari presiden hingga kepala daerah tahun 2024 nanti, “ ungkapnya.

(BAPPEDA)



# Pemkab Mimika Gelar Natal Bersama TNI Polri dan Masyarakat

**N**ATAL Bersama Perintah Kabupaten Mimika dengan jajaran TNI Polri dan masyarakat di Tanah Amungsa Bumi Kamoro di Gereja Kingmi Marthen Luther mlle 32 pada Kamis (28/12) ini berlangsung khidmat. Perayaan natal ini dihadiri ratusan masyarakat, jajaran TNI Polri dan keluarga besar Pemerintah Kabupaten Mimika.

Perayaan natal tahun ini mengangkat tema “Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi” (Lukas 2:14).

Pdt Christin Maniamboy dalam khotbahnya menekankan agar umat Kristen harus hidup dengan pedoman yang telah Tuhan berikan. Ia juga berpesan agar seluruh umat tuhan dapat berlingdung kepada Tuhan. “Carilah Tuhan dalam hidupmu,” pesannya.

Sementara itu Pj Sekda Mimika, Ro-

bert Mayaut, dalam sambutannya mengapresiasi kepada semua pihak karena selama ini Mimika merupakan salah kabupaten di Indonesia secara umum yang toleransi beragamanya sangat kuat.

Melalui perayaan natal bersama ini dengan tema “Kemuliaan Bagi Allah Dan Damai Sejahtera di Bumi”, dirinya mengajak semua pihak untuk dapat menjadikan natal kali ini sebagai inspirasi untuk membuka diri dan hati agar Roh Kudus menolong semua umat Tuhan dalam menjalani kehidupan di tahun ini dan tahun yang akan datang.

Ia menambahkan, natal juga harus disikapi sebagai upaya memotivasi pembaharuan iman, cinta kasih, kesederhanaan dan solidaritas sebagai cerminan kepatuhan.

Lanjutnya, dengan semangat natal ini hendaknya dapat diabadikan, bukan hanya untuk umat kristiani saja, tetapi lebih jauh untuk umat manusia pada umumnya.

“Atas nama pribadi dan pemerintah saya memberi apresiasi kepada semua pihak karena selama ini Mimika merupakan salah kabupaten di Indonesia secara umum yang toleransi beragamanya sangat kuat. Terimakasih pun disampaikan kepada semua pihak termasuk masyarakat yang telah mendukung pemerintah baik dalam doa dan sumbangsih pikir serta topangan lainnya untuk menata dan membangun daerah tercinta ini,” ungkapny.

Perayaan natal pemkab ditutup dengan doa bersama dari perwakilan lima agama di Mimika. (BAPPEDA)



Pj Sekda Mimika, Dominggus Robert Mayaut menyalakan lilin natal.

Foto: Bappeda

# Pemkab Mimika Hibahkan Rp 219 Miliar Untuk Pemilu

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika mengalokasikan anggaran sekitar Rp 219 miliar untuk suksesi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Itu ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Mimika dengan KPU, Bawaslu, TNI dan Polri di Hotel Grand Tembaga pada Jumat (10/11/2023).

Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Bupati Mimika yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Willem Naa dengan Bawaslu Mimika, KPU Mimika, Kapolres Mimika dan Dandim 1710/Mimika.

Penyediaan dana hibah kegiatan Pilkada yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2023 dan 2024 meliputi, KPU sebesar Rp140.910.206.500, Bawaslu Rp36.404.970.777, Polres Mimika Rp27.453.270.000 dan Kodim 1710 senilai Rp16.879.550.000.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Willem Naa dalam sambutannya mengatakan, NPHD merupakan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelaksanaan pemilu dan pilukada serentak tahun 2024 sesuai tahapan KPU, untuk penggunaan dan pertanggungjawaban agar sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyalurannya dilakukan dalam dua tahap tahap, yakni pertama 40 persen dari nilai NPHD disalurkan pada tahun 2023, kemudian tahap kedua 60 persen dari nilai NPHD disalurkan pada tahun 2024 dalam pilkada nanti.

"Saya berharap sinergitas antara Pemda, TNI, POLRI dan penyelenggara tetap terpelihara dengan baik, sehingga semua tahapan berjalan aman, tertib dan lancar. Diharapkan kepada penyelenggara, terus menjaga profesionalisme dalam melaksanakan tugas tahapan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Mimika," katanya.



NPHD bertujuan untuk meningkatkan akses dan fasilitas di daerah dalam melaksanakan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan pilkada.

Selanjutnya, meningkatkan kualitas tertibnya administrasi bagi para pemilih, agar saat penyelenggaraan pilkada nanti dapat terlaksana dengan aman, kondusif serta mewujudkan kehidupan demokrasi di daerah.

NPHD dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, fungsional, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas, dan NPHD yang telah ditandatangani ini sebagai satu syarat pengajuan pencairan dana.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan NPHD ini, semoga kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Laurens Minipko, Ketua KPU Mimika yang mewakili penerima hibah dalam sambutannya mengatakan, karakteristik pemilu dan pemilihan tentu saja urgen dibutuhkan dana yang besar untuk menghidupkan dan menggerakkan mesin sistem penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024.

"Dalam konteks pemilihan kepala daerah

di Kabupaten Mimika dibutuhkan dana hibah dari pemerintah daerah setempat sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri nomor 41 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendagri 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah," katanya.

Ia berharap dengan semangat juang para pahlawan menjadi roh pendorong bersama dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Semangat berkorban, melayani, berbakti, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, berintegritas dan bermartabat, menjaga kokoh kuat Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi roh yang menggerakkan bersama, serta percaya dengan semangat juang para pahlawan akan dapat mensukseskan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

"Kami, mewakili lembaga Komisi Pemilihan Umum, pimpinan KPU pada tingkat pusat dan pimpinan pada tingkat provinsi, mengucapkan berlimpah-limpah terima kasih kepada Bupati Mimika Dr. Eltinus Omaleng, SE MH dan seluruh jajaran Pemda Mimika yang dengan penuh kasih akan menghibahkan dana untuk menunjang pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah," tutupnya. (BAPPEDA)

# FGD Pengadaan Barang dan Jasa

**P**EMERINTAH Kabupaten (Pekab) Mimika melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menggelar kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2023 di Hotel Horison Ultima, Senin (4/12).

Kegiatan FGD yang dibuka Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika dihadiri oleh beberapa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Pokja, PPTK serta narasumber dan undangan lainnya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mimika, Bambang Wijaksono, dalam laporannya mengatakan, kegiatan FGD bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menyatukan pemahaman tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Pemkab Mimika guna meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara kredibel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut katanya, sebagai bentuk keseriusan Pemkab Mimika dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang kredibel.

"Kegiatan ini dihadiri pula narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia (RI), Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), serta Tenaga Ahli Keuangan Negara Universitas Respati Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika dalam sambutannya mengatakan, pengadaan barang dan jasa mempunyai peran penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dalam peningkatan pelayanan publik serta pengembangan perekonomian daerah.

"Jadi, engadaan barang dan peme-



rintah tidak hanya sekadar mencari harga yang termurah dari penyedia. Namun, tujuannya adalah menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan (value for money) yang diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, dan biaya, di mana setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan nilai tambah bagi pencapaian kebutuhan barang dan jasa," jelasnya.

Ia juga menjelaskan, dalam rangka mewujudkan value for money, dibutuhkan pelaku pengadaan yang profesional, berkualitas, dan berkompeten dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa.

Ia juga menyinggung bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aktifitas yang sering mendapat sorotan.

"Untuk itu, proses pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip transparansi, adil, dan tidak diskriminatif, yang mana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi masyarakat," ungkapnya.

Lanjutnya, perlu adanya komitmen

yang sungguh-sungguh dari semua pelaku pengadaan dalam mewujudkan pengadaan yang kredibel dengan menghindari berbagai potensi penyimpangan khususnya yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Ia juga mengimbau kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga dapat berdampak positif terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta menjadi bekal dalam melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab atas pekerjaan dan jabatan.

Ia juga berharap forum pengadaan barang dan jasa ini dapat meningkatkan pemahaman kita serta menyebarkan persepsi pengadaan barang dan jasa bagi seluruh pelaku pengadaan dan sekaligus sebagai kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran 2024. **(BAP-PEDA)**

# Pemkab Mimika Jadi Percontohan Penyusunan RPJPD Bagi Kabupaten lain di Papua Tengah

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sedang menyusun Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Dalam penyusunan dokumen Ranwal RPJPD, Bappeda Mimika telah melalui beberapa tahapan termasuk melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Hal ini diapresiasi oleh Kepala Bappeda Provinsi Papua Tengah, Eddy Way usai melakukan pertemuan dengan Pemkab Mimika di kantor Bappeda, Senin (19/12/2023).

Eddy mengapresiasi Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling bersama tim serta tim akademisi yang dilibatkan dalam penyusunan Ranwal RPJPD. "Hari ini kita melihat bagian yang luar biasa telah dikerjakan oleh Bappeda dan luar biasanya pada poin semua pentahapan hampir semua sudah diikuti," jelasnya.

Ia menjelaskan, dalam penyusunan dokumen ini diarahkan pada prosedu-

ral dan substansial. Keduanya sudah dipenuhi oleh Pemkab Mimika. Sehingga Bappeda Provinsi Papua Tengah menjadikan apa yang didesain dan dirancang oleh Kabupaten Mimika sebagai bahan untuk direplikasi atau ditiru oleh tujuh kabupaten lain yang ada di Provinsi Papua Tengah.

Dalam penyusunan RPJPD berkaitan dengan Papua Tengah dijelaskan Eddy, Papua Tengah lahir belakangan sedangkan daerah di bawahnya termasuk Mimika lebih dahulu. Sehingga terkait RPJPD, memiliki prinsip mengacu dan mempedomani. Mempedomani dalam artian, dokumen teknokratik atau dokumen di bawah harus mengacu pada dokumen yang di atasnya ini terkait dokumen pembangunan. Kemudian mengacu, yaitu kabupaten harus mengacu ke dokumen ruang di tingkat provinsi sampai tingkat nasional.

"Pertemuan hari ini adalah pertemuan selain memenuhi kriteria penjadian dokumen, kita juga memeriksa apa isi dari dokumen itu apakah kriteria pemenuhan dokumen benar-benar digali dari pada

kepentingan apa yang menjadi kerinduan orang banyak di Mimika pada 0 tahun di 2025 sampai tahun di Tahun 2045 sebagai durasi pembangunan jangka panjang Kabupaten Mimika," terangnya.

Dokumen RPJPD ini berlaku selama 20 tahun. Diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan durasi lima tahunan. Kemudian dijabarkan lagi dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun.

Sehingga dokumen ini harus menjadi materi yang harus disampaikan kepada peserta kontestasi pemilihan kepala daerah dalam menyusun visi misi agar selaras dengan RPJPD kabupaten.

Secara nasional, tema besar yang dalam rencana pembangunan jangka panjang adalah Indonesia Emas di Tahun 2045. Berarti Papua Tengah harus emas, kabupaten di bawahnya pun harus emas. "Artinya ada banyak indikator yang disusun di dalamnya untuk pencapaian Indonesia emas di Tahun 2045," ujar Eddy.(BAPPEDA)



# UMK Mimika Tahun 2024 Ditetapkan Rp 4,6 Juta

**D**INAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mimika telah menggelar sidang penetapan Upah Minum Kabupaten Mimika Tahun 2024 bersama dewan pengupahan yang terdiri dari serikat pekerja dan pengusaha melalui KADIN.

Kepala Disnakertrans Mimika, Paulus Yanengga ditemui Senin (4/12/2023) mengatakan, UMK Mimika Tahun 2024 mendatang mengalami kenaikan sebesar 2 persen dari sebelumnya Rp

4,3 juta jadi Rp 4,6 juta.

Kenaikan ini kata dia, tidak sebesar kenaikan dari Tahun 2021 ke Tahun 2022. Dimana sebelumnya Rp 3,9 juta langsung naik jadi Rp 4,3 juta. "Itu dulu naiknya sekitar 6 persen, sekarang naik 2 persen," katanya.

UMK ini mulai berlaku per 1 Januari 2024 mendatang. Disnakertrans Mimika akan membuat surat penetapan yang ditandatangani oleh Bupati Mimika kemudian diserahkan ke Pemerintah

Provinsi Papua Tengah untuk ditetapkan lewat Surat Keputusan Gubernur Papua.

Menurut Paulus, kenaikan ini terjadi karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi di Mimika mengalami peningkatan. Begitu pun dengan inflasi yang tidak stabil sehingga turut mempengaruhi daya beli masyarakat. "Itu indikator kita menetapkan kenaikan UMK sebesar 2 persen jadi Rp 4,6 juta," tandasnya. **(BAP-PEDA)**



Foto Ilustrasi Bundaran SP 2



*Mimika Membangun*